



## Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Studi Tentang Upaya Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Oleh Pemerintah Kota Tanjung pinang)

Putri Nabila<sup>1</sup>, Yudhanto Satyagraha Adiputra<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung pinang, Indonesia

Korespondensi Penulis: [bilaptr3009@gmail.com](mailto:bilaptr3009@gmail.com)

**Abstract.** *This study analyzes Indonesian Education Policy through the Implementation of the Merdeka Curriculum in Tanjungpinang City Elementary Schools based on Edward III's policy implementation theory (communication, resources, attitudes/dispositions, bureaucratic structure). This qualitative research evaluates the implementation of the Merdeka Curriculum in Tanjungpinang City Elementary Schools using observation methods and interviews with the Head of the Elementary Development Division. Analysis of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure shows effective policy communication through coordination meetings and socialization. The results showed that the communication of the Education Office went well through coordination meetings and socialization, although internal consistency needs to be improved. There is technical guidance for teachers and curriculum derivatives according to Permendikbudristek Number 12 of 2024, but obstacles to teacher adaptation, teaching materials, and infrastructure are found. Teachers' attitudes are positive, influenced by their understanding, resources and work environment. A clear bureaucratic structure supports implementation. In conclusion, implementation shows positive progress, but needs to improve internal communication, resources and continuous evaluation.*

**Keywords:** *Indonesian Education Policy, Education Office, Merdeka Curriculum.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis Kebijakan Pendidikan Indonesia melalui Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, struktur birokrasi). Penelitian kualitatif ini mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang menggunakan metode observasi serta wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SD. Analisis terhadap komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan komunikasi kebijakan yang efektif melalui rapat koordinasi dan sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi Dinas Pendidikan berjalan baik melalui rapat koordinasi dan sosialisasi, meskipun konsistensi internal perlu ditingkatkan. Terdapat bimbingan teknis bagi guru dan turunan kurikulum sesuai Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, namun kendala adaptasi guru, materi ajar, dan sarana prasarana ditemukan. Sikap guru positif, dipengaruhi pemahaman, sumber daya, dan lingkungan kerja. Struktur birokrasi yang jelas mendukung implementasi. Kesimpulannya, implementasi menunjukkan progres positif, tetapi perlu peningkatan komunikasi internal, sumber daya, dan evaluasi berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan Indonesia, Dinas Pendidikan, Kurikulum Merdeka.

### 1. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan peningkatan kualitas pendidikan. Perubahan lingkungan pendidikan saat ini sangat diperlukan profesionalisme di segala bidang termasuk dunia pendidikan. Adanya pendidikan di dunia akan menjadikan bangsa yang berkualitas dan juga tidak lepas dari peran pemerintah dalam mendesain dan membentuk suatu sistem yang bijak sehingga pemerintah melalui organisasi-organisasi daerah nya yang mengurus pendidikan sebagai pelaku dan pemegang kunci keberhasilan sebuah pendidikan dapat menjalankan fungsinya dengan tepat (Andriansyah & Niswanto, 2021). Kebijakan adalah serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan

dasar rencana dalam pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang telah dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada serta cara-cara pemimpin bertindak.

Visi kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi tahun 2035 yakni membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, Sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, hal tersebut memerlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan sebagai upaya adaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat.

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan pentingnya pengaturan yang luas mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban warga negara hingga penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Implementasi Kurikulum Merdeka menjadi salah satu langkah atau komponen penting dalam ranah pendidikan di Indonesia. Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar telah mengubah dasar sistem Indonesia. Lahirnya kebijakan pemerintah mengenai kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar merupakan momen krusial dalam perkembangan sistem pendidikan Indonesia (Rahmafritri et al., 2024).

Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) menerbitkan kebijakan mengenai pengembangan Kurikulum Merdeka (Ariga, 2022). Kurikulum Merdeka yang diterapkan di tingkat Sekolah Dasar memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, sejalan dengan kebijakan Pemerintahan pusat lalu dijalankan oleh Dinas Pendidikan di Kota Tanjungpinang. Dengan menekankan pada pengembangan potensi dan minat siswa, kurikulum ini memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu, yang merupakan salah satu aspek kunci dari kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Kebebasan guru untuk memilih berbagai perangkat ajar yang relevan juga mendukung terciptanya suasana belajar yang lebih menarik dan efektif, sehingga siswa dapat lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Fokus Kurikulum Merdeka pada profil pelajar Pancasila yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Atmojo dkk, 2024), sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang unggul dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka bukanlah akibat dari kegagalan implementasi Kurikulum 2013, melainkan merupakan langkah strategis pemerintah untuk memulihkan pendidikan pasca pandemi Covid-19. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi krisis belajar yang terjadi akibat terhentinya pembelajaran tatap muka, yang menyebabkan penurunan kompetensi peserta didik (Pratyca dkk, 2023).

Meskipun transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, masih terdapat sejumlah tantangan signifikan yang perlu diatasi (Rahim & Ismaya, 2023). Di Kota Tanjungpinang, implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya pemahaman dan kesiapan guru dalam mengadaptasi metode pengajaran yang baru, serta kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan mandiri. Selain itu, belum adanya sistem evaluasi yang komprehensif untuk menilai dampak perubahan kurikulum ini terhadap kualitas pendidikan juga menjadi perhatian penting. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan, pelaksanaan di lapangan seringkali tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas dan relevan di tingkat dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai tantangan-tantangan tersebut dan mencari solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas Kurikulum Merdeka di Kota Tanjungpinang.

Pergantian Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka merupakan langkah dalam kebijakan pendidikan Indonesia, bertujuan memperkuat otonomi sekolah dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat era 5.0 (Gumilar dkk, 2023). Penelitian ini menelaah upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar, menganalisis tantangan dan keberhasilannya dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif, beragam, dan relevan dengan konteks lokal.

Dengan karakter yang baik dan kemampuan akademis yang kuat, siswa diharapkan akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Maka dari itu, penerapan Kurikulum Merdeka dapat dianggap sebagai langkah strategis yang mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang. Melalui kurikulum ini, diharapkan akan tercipta generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas

dan nilai sosial yang tinggi, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa.

## 2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, menurut Moleong (2013) penelitian kualitatif adalah penelitian dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya dari perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Pengumpulan data diperoleh dengan melalui beberapa bentuk pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, studi dokumen/dokumentasi hasil observasi atau pengamatan di lapangan. Penelitian ini berfokus pada upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Subjek penelitian disini adalah Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Dalam penelitian ini, penulis berperan dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendekati topik, mengumpulkan data, hingga menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya. Kegiatan penelitian penulis dibantu dengan alat penelitian seperti lembar pedoman wawancara, hasil observasi lapangan dan studi dokumentasi.

Peneliti menganalisis hasil wawancara dan mencocokkannya dengan data dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama adalah untuk memperoleh data yang valid. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik ini, peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:156), penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai konteks, sumber, dan metode. Tahapan dalam penelitian kualitatif meliputi: (1) orientasi, (2) eksploitasi, dan (3) pemeriksaan kembali. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* berarti pelari serta *curare* berarti tempat pacuan. Dapat dipahami jarak yang wajib ditempuh dalam pendidikan ialah berkaitan dengan kurikulum dengan muatan seperangkat alat pembelajaran serta materi bahan Pelajaran yang menjadikan kurun waktu yang wajib dijalankan oleh siswa dan guru sehingga tercapainya tujuan pendidikan (Ledia dkk, 2024).

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang menggabungkan metode modifikasi kebijakan yang dirancang pemerintah untuk mengembalikan esensi yang semakin terkikis. Dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada guru dan siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan pendidikan Indonesia (Aisyah dkk, 2022). Diharapkan hal ini akan membuat kedua belah pihak menjadi lebih kreatif dan kritis dalam menghasilkan ide dan menyuarakan pendapat tanpa adanya paksaan atau pembatasan. Jelaslah bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memungkinkan siswa untuk berpikir bebas, menciptakan karya mereka sendiri, dan menyuarakan pemikiran mereka.

Siswa diberikan kebebasan untuk memilih tempat belajar sesuai dengan karakteristik masing-masing berkat kurikulum independen yang dibuat untuk mencegah siswa menjadi tidak tertarik dengan model pembelajaran yang selalu digunakan di kelas. Diharapkan dengan adanya metode pembelajaran ekstrakurikuler ini, para siswa dapat merasa nyaman dan terbebas dari pelajaran yang membosankan dan tugas yang banyak. Penelitian ini mengkaji upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar di wilayahnya, sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional.

Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III (Kalalo dkk, 2018) yang menjelaskan bahwa ada pendekatan teori yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, yakni : (1) Komunikasi (*communication*), (2) Sumber Daya (*resources*), (3) Sikap (*disposition*), (4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*). Pendekatan tersebut menjadi standar yang digunakan peneliti untuk melihat pengimplementasian kebijakan Dinas Pendidikan dalam Program Kurikulum Merdeka di Kota Tanjungpinang.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi diartikan sebagai proses untuk menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:150) sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat Keputusan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, sehingga implementasi yang efektif terjadi jika para pembuat Keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan mengenai apa yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi dilakukan dengan baik, sehingga Keputusan dari suatu kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Komunikasi penyaluran Kurikulum Merdeka dari Dinas Pendidikan ke Sekolah Dasar yang terlibat melalui dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar lalu Mensosialisasikan Kurikulum Merdeka melalui berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan melaksanakan rapat koordinasi (RAKOR) sebagai salah satu strategi utama. Melalui RAKOR ini, informasi mengenai kebijakan tersebut disampaikan secara langsung kepada para pihak terkait. Untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh semua guru dan tenaga pendidik, Dinas Pendidikan juga memanfaatkan berbagai media komunikasi. Salah satunya adalah sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, di mana narasumber dari Dinas Pendidikan dan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) berperan aktif dalam menjelaskan kebijakan tersebut.

Dinas pendidikan Kota Tanjungpinang menyelenggarakan pertemuan dengan kepala sekolah, guru dan staf sekolah untuk menjelaskan konsep dan prinsip Kurikulum Merdeka. Melalui hasil Wawancara peneliti kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang, beliau mengatakan pada saat sosialisasi Kurikulum Merdeka dari Kemdikbudristek dan Kemdikdasmen memberikan panduan tentang implementasi kurikulum, termasuk pelatihan bagi guru agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dengan efektif. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih holistik dan berpusat pada siswa.

Temuan studi menunjukkan bahwa pendekatan dinas pendidikan Kota Tanjungpinang melalui Komunikasi bidang Pembinaan Sekolah Dasar untuk menyebarluaskan pengetahuan Kurikulum Merdeka dipastikan informasi yang disebarluaskan mencapai target kebijakan dan tidak menimbulkan kebingungan namun Lembaga dapat lebih menekankan pada menjaga konsisten internal untuk memudahkan siswa berpartisipasi dalam program Kurikulum Merdeka.

## **2. Sumber Daya**

Sesuatu Kebijakan diperlukan sumber daya untuk mendukung proses pelaksanaan kebijakan baik dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pendukung yang lain (Iswandi dkk, 2021). Dalam melaksanakan kebijakan Kurikulum Merdeka, sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, maka diperlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan mengakselerasikan antara tataran teoritis maupun praktis. Pada umumnya

Sumber Daya Manusia yang nantinya sebagai pengawal Program Kurikulum Merdeka guru atau tenaga pendidik yang berada dalam ruang lingkup Sekolah Dasar yang ada di Kota Tanjungpinang. Hal itu termasuk sebagai bagian dari kekuatan sumber daya manusia dan juga peluang yang bisa dimanfaatkan dinas pendidikan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai guru untuk menjalankan program kurikulum Merdeka dan untuk diajarkan kepada siswa Sekolah Dasar.

*“Sumber daya yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar Kota Tanjungpinang melalui bimbingan ke tenaga pendidik, memberikan turunan kurikulum yang diturunkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024” (Wawancara 20 Mei 2025).*

Bimbingan teknis diberikan kepada guru SD di Kota Tanjungpinang untuk memastikan pemahaman dan implementasi Kurikulum Merdeka yang efektif. Bimbingan ini kemungkinan mencakup berbagai aspek, seperti metodologi pembelajaran berbasis proyek, asesmen autentik, dan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang mengembangkan turunan kurikulum yang sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Turunan kurikulum ini menyesuaikan kerangka Kurikulum Merdeka dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan kebutuhan khusus di Kota Tanjungpinang. Proses ini memastikan relevansi dan kesesuaian Kurikulum Merdeka dengan konteks lokal. Turunan kurikulum ini kemungkinan mencakup panduan pembelajaran, silabus, dan perangkat asesmen yang spesifik untuk sekolah dasar di Kota Tanjungpinang.

Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, khususnya transisi dari Kurikulum 2013, beberapa kendala terkait sumber daya memang ditemukan. Pertama, adaptasi tenaga pengajar terhadap pendekatan pembelajaran yang berbeda membutuhkan waktu dan pelatihan intensif. Materi ajar yang disesuaikan dengan Kurikulum Merdeka juga masih dalam tahap pengembangan dan penyediaan, sehingga ketersediaannya belum sepenuhnya merata di semua sekolah. Terakhir, sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat teknologi dan ruang kelas yang memadai, juga menjadi tantangan, terutama di sekolah-sekolah dengan keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Kendala-kendala ini langsung menemukan solusi dalam penyelesaiannya, seperti pelatihan berkelanjutan bagi guru, penyediaan materi ajar yang lebih lengkap dan mudah diakses, serta dukungan infrastruktur yang memadai dari pemerintah.

### 3. Sikap/Disposisi

Disposisi ini dapat dijelaskan bahwasanya karakter dimiliki oleh implementator meliputi komitmen atau tekad yang kuat dan kejujuran, hal ini berpengaruh besar untuk proses pengimplementasian kebijakan yang akan dijalankan (Ramadhan & Megawati, 2023). Jika implementator mempunyai sikap yang baik maka kebijakan yang dilaksanakan akan berjalan sesuai dengan tujuan.

Sikap atau tingkah laku saat pelaksanaan implementasi kebijakan perlu diperhatikan karena dengan adanya sikap yang baik dari penyelenggara kebijakan sampai penerima maka bisa disebut pengimplementasian kebijakan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Secara umum, para pendidik dan staf sekolah menyambut baik kebijakan Kurikulum Merdeka, meskipun awalnya terdapat beberapa kekhawatiran karena perubahan dari Kurikulum 2013. Surat edaran yang disebarluaskan oleh Dinas Pendidikan telah mendorong pelaksanaan kebijakan ini. Walaupun perubahan sikap tidak tampak mencolok setelah penerapan, pandangan positif dan persetujuan terhadap Kurikulum Merdeka semakin kuat seiring pemahaman mereka yang meningkat.

Faktor utama yang mempengaruhi sikap guru adalah tingkat pemahaman mereka terhadap Kurikulum Merdeka pemahaman yang menyeluruh memicu penerimaan dan penerapan yang positif. Dinas Pendidikan berupaya mendorong sikap positif melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menghilangkan kesalahpahaman tentang Kurikulum Merdeka. Semakin banyak guru yang memahami Kurikulum Merdeka, semakin positif pula pandangan dan penerapannya di kelas.

Beberapa faktor saling berkaitan mempengaruhi sikap guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka yang peneliti dapat dari hasil wawancara peneliti bersama Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

a. Tingkat pemahaman mereka terhadap Kurikulum Merdeka itu sendiri

Guru yang telah mengikuti pelatihan yang memadai dan memahami konsep-konsep inti kurikulum, cenderung lebih positif dan percaya diri dalam implementasinya. Sebaliknya, guru yang masih merasa kurang memahami atau belum terlatih dengan baik, mungkin akan ragu-ragu dan cenderung mempertahankan metode lama.

b. Ketersediaan sumber daya pendukung



Seperti materi ajar yang relevan, sarana dan prasarana yang memadai, dan dukungan administrasi sekolah, juga berperan penting. Ketiga, faktor lingkungan kerja juga berpengaruh. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua siswa sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penerapan Kurikulum Merdeka.

c. Motivasi dan komitmen pribadi guru juga sangat menentukan

Guru yang memiliki motivasi tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan berinovasi, akan lebih mudah beradaptasi dan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan efektif. Jadi, bukan hanya pemahaman, tetapi juga dukungan sistemik dan komitmen pribadi yang menjadi kunci keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di kelas.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini memiliki daya pengaruh yang baik dalam proses mengimplementasikan kebijakan. Standar Operational Prodesural (SOP) merupakan pedoman untuk implementator dalam menjalankan kebijakan agar sesuai, sebagai tuntunan internal dari implementasi suatu kebijakan yang dijalankan (Yalia, 2014). Pelaksanaan SOP dan Susunan Keanggotaan Tim disesuaikan dengan Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 154 tahun 2024. Menurut Edward III, seperti yang dikutip oleh Widodo (2010), efektivitas implementasi kebijakan dapat terhambat oleh ketidakefisienan dalam struktur birokrasi. Meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut tersedia dan para pelaksana memahami tugas serta cara pelaksanaannya, serta memiliki motivasi untuk melakukannya, hal ini tidak menjamin keberhasilan. Struktur birokrasi mencakup berbagai aspek, seperti pembagian kewenangan dan hubungan antar unit organisasi. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Implementasi Kurikulum Merdeka di Tanjungpinang berjalan melalui struktur birokrasi Dinas Pendidikan yang berjenjang, dimulai dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang lalu ke pengawas sekolah dasar, dan akhirnya ke satuan pendidikan masing-masing. Berikut susunan keanggotaan tim pembahasan Kurikulum Merdeka untuk Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 154 Tahun 2024.

Jabatan	Tanggung Jawab
<b>Kepala Dinas Pendidikan</b>	Pengambilan keputusan strategis terkait pendidikan.
<b>Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar</b>	<b>Mengawasi dan membina</b> pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah dasar, termasuk memberikan dukungan teknis kepada pengawas dan kepala sekolah.
<b>Pengawas Sekolah Dasar</b>	<b>Melakukan pengawasan dan pembinaan</b> terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah dasar.
<b>Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar</b>	<b>Mengelola dan memastikan</b> ketersediaan sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kurikulum, seperti ruang kelas, alat belajar, dan fasilitas lainnya.
<b>Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar</b>	<b>Menyusun rencana kegiatan</b> yang berkaitan dengan pembinaan minat, bakat, dan prestasi peserta didik.

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2025

Struktur organisasi di Dinas Pendidikan sendiri telah mengakomodasi kebijakan ini dengan penambahan bagian kurikulum di setiap bidang, seperti contohnya Bapak Masri sebagai analis kebijakan ahli muda kurikulum SD di bagian pembinaan SD. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah berjalan dengan mekanisme yang mewajibkan satuan pendidikan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen penuh dari Dinas Pendidikan dalam memastikan implementasi Kurikulum Merdeka. Menurut narasumber, tidak ada tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam menjalankan struktur birokrasi selama implementasi kebijakan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur standar dalam implementasi Kurikulum Merdeka telah diupayakan sedemikian rupa sehingga petunjuk pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan lebih sederhana. Hal ini dilakukan agar dapat disesuaikan dengan sumber-sumber yang ada serta menciptakan keseragaman tindakan dari para pelaksana. Mengenai fragmentasi, dapat terlihat dari kejelasan SOP pada setiap program yang memudahkan pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka. Masing-masing pihak yang terkait, baik di tingkat Dinas Pendidikan maupun di satuan pendidikan, mengetahui tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang menunjukkan hasil yang beragam. Komunikasi dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah berjalan relatif baik melalui rapat koordinasi dan sosialisasi, meskipun konsistensi internal perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Terkait sumber daya, bimbingan teknis telah diberikan kepada guru dan turunan kurikulum dikembangkan sesuai Peraturan Mendikbudristek No.12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum PAUD Dan Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, namun kendala adaptasi guru, ketersediaan materi ajar, dan sarana prasarana masih ditemukan. Sikap guru terhadap Kurikulum Merdeka umumnya positif, dipengaruhi oleh pemahaman, dukungan sumber daya, dan lingkungan kerja. Struktur birokrasi yang jelas dan SOP yang terdefinisi baik mendukung implementasi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat progres positif, peningkatan komunikasi internal, penyediaan sumber daya yang lebih memadai, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka secara optimal.

Saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka di Kota Tanjungpinang meliputi: penguatan komunikasi internal yang konsisten, peningkatan sumber daya berupa materi ajar, sarana prasarana, dan pelatihan berkelanjutan bagi guru; penguatan dukungan sistemik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua; evaluasi dan monitoring berkelanjutan untuk penyesuaian dan perbaikan; serta penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang Kurikulum Merdeka terhadap prestasi belajar siswa dan pengembangan karakter.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijaksanaan publik*. CV Alfabeta.
- Aisyah, L., Rizqiqa, F. N., Putri, F. D., & Nulhaq, S. (2022). Kurikulum Merdeka dalam perspektif pemikiran pendidikan Paulo Freire. *At-Ta`lim: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 162–172.
- Andriansyah, T., & Niswanto, D. (2021). Kebijakan Dinas Pendidikan Nagan Raya dalam peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Visipena*, 12(1), 30.
- Ariga, S. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka pasca pandemi COVID-19. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 662–670. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>

- Atmojo, I. R. W., Adi, F. P., Ardiansyah, R., & Saputri, D. Y. (2024). Pembelajaran berdiferensiasi (dalam implementasi Kurikulum Merdeka). CV Pajang Putra Wijaya.
- Edwards III, G. C., & Sharkansky, I. (1978). *The policy predicament: Making and implementing public policy*. W.H. Freeman and Company.
- Gumilar, G., Perdana, D., Rosid, S., Sumardjoko, B., Ghufron, A., & Dasar, M. P. (2023). Urgensi penggantian Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Papeda*, 5(2).
- Indonesia. (2003). Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Iswandi, Ramadhani, P., Gusti Randa, M., & Nofrijon. (2021). Implementasi, proses kompleks, dan faktor pelaksanaan kebijakan pendidikan. *Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1, 30–41.
- Kalalo, M. M. K., Kimbal, M., & Kimbal, A. (2018). Implementasi kebijakan pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Eksekutif*, 1(1).
- Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 154 Tahun 2024.
- Ledia, S., Mauli, B., & Bustam, R. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6, 790–816. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.2708>
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif* (ed. revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Mendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Pratyca, A., Dharma Putra, A., Salsabila, A. G. M., Adha, F. I., & Fuadin, A. (2023). Analisis perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 58–64. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1974>
- Rahim, A., & Ismaya, B. (2023). Pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka Belajar: Tantangan dan peluang. *JSE: Journal Sains and Education*, 1(3), 88–96.
- Rahmafritri, F., Deswita, E., & Trisoni, R. (2024). Analisis kebijakan Kurikulum Merdeka dan implikasinya terhadap kualitas pendidikan. *DIRASAH*, 7(1). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>
- Ramadhan, S., & Megawati, S. (2023). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 1581–1592.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widodo. (2010). *Implementasi kebijakan*. Andi Offset.

Yalia, M. (2014). Implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial media tradisional di Jawa Barat. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(1), 149–160.